

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) merupakan balai perkeretaapian di bawah Kementerian Perhubungan yang berada di Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di Kota Palembang. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 938/KMK.05/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum, sehingga dengan demikian Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan juga bertanggungjawab kepada Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan selaku Direktorat Pembina BLU.

Biaya operasional kereta *light rail transit* (LRT) Palembang, Sumatera Selatan, digelontorkan pemerintah pusat sebesar Rp 10 miliar dalam sebulan. Sementara, penghasilan dari operasional LRT Palembang, hanya mendapatkan Rp 1 Miliar perbulan dengan total penumpang dalam sehari sekitar 5.000. dengan pendapatan tersebut, operasional LRT mengalami

kerugian sebesar Rp 9 Miliar per bulan. Direktur Jenderal Perkereta Apian Kemenhub Zulfikri mengatakan, pendapatan LRT yang minim dari jumlah pengeluaran dikarenakan masih dalam masa konstruksi. Masa konstruksi ini pun, menurutnya akan berakhir hingga Mei 2019 mendatang (www.kompas.com). Dampak *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) sangat berpengaruh bagi pendapatan LRT karena penyakit Covid-19 ini menular dan usaha, dan penyebaran virus nya sangat cepat yang menyebabkan turunnya pendapatan pada LRT Sumsel.

Pandemi Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kasus penularan pertama ini terungkap setelah pasien melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang ternyata positif COVID-19 saat diperiksa di Malaysia pada 14 Februari 2020. Penularan sudah menyebar ke 34 Provinsi dengan DKI Jakarta adalah sebagai Provinsi yang banyak terpapar. Upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 dilakukan dengan cara memakai masker dan mencuci tangan yang diadakan secara mandiri oleh masyarakat. Pemerintah juga melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 (Soehardi dkk, 2020). Jumlah rata-rata penumpang LRT Sumsel perhari pada tahun 2019 bisa mencapai 7.159/hari. Pada tahun 2020 merupakan pertama kali masuknya Covid-19 ke Indonesia pada saat Covid-19 telah menyebar sampai ke seluruh indonesia dan Pemerintah juga melaksanakan PSBB yang menjadikan jumlah penumpang LRT menurun dengan rata-rata penumpang LRT Sumsel bisa mencapai 2.889/hari. Pada tahun 2021 rata-rata jumlah penumpang sudah mulai meningkat hingga 4.376/hari. Penurunan jumlah penumpang yang menurun akibat adanya Covid-19 ini menimbulkan pendapatan LRT sumsel menurun dan mengalami kerugian.

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan seluruh ukuran yang dikoordinasikan demi menjaga kekayaan perusahaan, memantau ketelitian dan keandalan akuntansi, membantu mengefisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen perusahaan.

Pengendalian digunakan untuk membuat organisasi perusahaan menjadi lebih disiplin dan terstruktur, pengendalian internal dapat berjalan dengan efektif apabila tujuan tertentu suatu organisasi tercapai. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Keefektifan Pengendalian Internal pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil regresi linier sederhana yang memiliki nilai T_{hitung} sebesar -2,985 yang lebih besar dari T_{tabel} sebesar 1,665 dan memiliki signifikansi 0,004 atau dibawah 0,05. Dari pengujian ini diperoleh nilai R^2 sebesar 0,105 yang berarti Kecenderungan Kecurangan Akuntansi DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta dipengaruhi oleh Keefektifan Pengendalian Internal sebesar 10,5% (Putri, 2014). Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 938/KMK.05/2019 tentang Penetapan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), bahwa BPKARSS mempunyai tujuan yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran negara melalui subsidi yang diberikan kepada BPKARSS, sehingga menjadikan beban pengeluaran negara dapat berkurang kedepannya.

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) merupakan subyek penelitian dan berdasarkan latar belakang tersebut dilakukan untuk mengetahui **“Mengungkap Praktik Pengendalian**

Internal Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Di Masa Covid-19”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yang dapat peneliti identifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana system praktik pengendalian internal di Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel?
2. Bagaimana praktik pengendalian internal di Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel di masa Covid-19?

1.3 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaruan (*novelty*) dalam bidang akuntansi dengan melihat bagaimana praktik keseharian pengendalian internal di Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dalam mencapai tujuannya meningkatkan pendapatan agar mengurangi beban pengeluaran negara kedepannya.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini dibuat yaitu agar diketahui seberapa besar pengaruh efektifitas pengendalian internal dan dampak pandemi COVID-19 terhadap pendapatan di BPKARSS (LRT Sumsel). Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui system pengendalian internal di Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.
2. Untuk mengungkap makna praktik pengendalian internal di Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti dari seluuh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1.5.1. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan pembaca sebagai tambahan materi dibidang akuntansi khususnya dalam penelitian pengendalian internal.

- **Bagi Ditjem Kereta Api**
penelitian ini diharapkan dapat membantu mewujudkan salah satu tujuan dari terbentuknya Badan Layanan Umum (BLU) pada setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perkeretaapian Indonesia
- **Badan Layanan Umum**
Penelitian ini diharapkan dapat membantu Badan Layanan Umum (BLU) dalam mencari pendapatan dan menjadi acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.5.2. Bagi Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan yaitu selain menambah wawasan keilmuan serta perspektif baru, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pengembangan Ilmu Audit dan Sistem Informasi Akuntansi, serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang praktik pengendalian internal pada suatu organisasi.